



KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Anisa Nuraida Rahmah¹, Aulia Farkhan², Umar Alwatasi³, Farid Setiawan⁴

^{1,2,3}Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

¹anisa1900031044@webmail.uad.ac.id, ²aulia1900031047@webmail.uad.ac.id,

³Umar2011031152@webmail.uad.ac.id, ⁴farid.setiawan@pai.uad.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan kunci dari kemajuan suatu bangsa. Hadirnya pendidikan menjadikan nilai tambah bagi kualitas dari bangsa tersebut. Kemajuan pendidikan tersebut tak luput dari peran pemerintah dan pihak terkait yang menyusun sebuah kebijakan pendidikan di dalam bangsa tersebut. Kebijakan yang bisa dibidang sebagai suatu aturan yang dibuat agar alur pendidikan lebih tertata dan berjalan beriringan. Kebijakan yang hadir dengan berbagai konsep, karakteristik, dan tujuan yang melandasi keputusan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka, penulis mengangkat judul "Konsep, Karakteristik, dan Tujuan pendidikan" sebagai pengetahuan dasar sebelum membahas lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan yang di tetapkan oleh pemerintah. Penggunaan metode penelitian studi pustaka yang bersumber buku serta literatur lain yang terkait menghasilkan kesimpulan bahwa hadirnya kebijakan pendidikan sangatlah berpengaruh dalam mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik seagai acuan dalam memutuskan suatu kesepakatan. Kebijakan juga memiliki tujuan layaknya tujuan pendidikan. Maka hadirnya kebijakan pendidikan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: Pendidikan, Kebijakan dan Pemerintah

Abstract

This study Education is the key to a nation's progress. The advent of education added value to the quality of the nation. The development of the education will not go without the role of the government and the relevant parties formulating an educational policy within the nation. Policies that are, in a sense, rules that are designed to align the course of education and go hand in hand. Policies that are present with concepts, characteristics and goals that underlie decisions set forth by governments to achieve the goals of national education. Thus, the author defines "the concepts, characteristics and purposes of education" as a basic knowledge before going over the deeper issues of education policies set by governments. The use of the book - based library study methods and other related literature leads to the conclusion that the presence of education policies must have had a profound impact on achieving education goals. Education policies have a characteristic seagal reference in deciding an agreement. Policies also have educational objectives. The presence of education policies aligns with the objectives of national education.

Keywords: Educations, Policy and Government

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kegiatan yang sangat lengkap. Hampir semua dimensi kehidupan manusia baik langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Di dalam proses pendidikan terdapat unsur-unsur ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, kesehatan, sosiologis, psikologis bahkan agama. Namun demikian, manajemen pendidikan perlu memperhatikan dimensi-dimensi tersebut supaya strategi serta kebijakan yang diterapkan benar-benar membawa Indonesia pada tujuan yang di inginkan Kebijakan yang mengelola dalam sistem pendidikan dikenal sebagai kebijakan pendidikan. Banyak norma pendidikan telah diterbitkan untuk mendukung dan memberdayakan fasilitator pendidikan dan masyarakat untuk menumbuhkan pendidikan yang inovatif agar dapat mencapai target pendidikan. Pencapaian target pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berkaitan seperti pendidik, siswa, tujuan pendidikan, lingkungan, dan instrumen. Sistem tidak akan berjalan jika salah satu subsistem mengalami masalah yang mengakibatkan fungsi subsistem tersebut tidak most appropriate untuk menggapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kebijakan pendidikan di Indonesia sudah beberapa kali melakukan perubahan karena bertujuan untuk membangun sistem pendidikan nasional yang khusus untuk negara Indonesia.

Di tahun 2003, Undang-Undang perihal Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20 Tahun 2003 diundangkan. Pemberlakuan undang-undang tersebut membuktikan kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menggapai tujuan pendidikannya melalui kebijakan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan mempengaruhi kualitas pendidikan. Mutu pendidikan yang dicapai dikelola sesuai dengan pedoman pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan pendidikan memelihara hubungan di antara mereka, yang mempengaruhi proses manajemen sistem pendidikan. Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan harus dikembangkan dengan fokus pada melaksanakan tujuan dari pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah harus mengembangkan kebijakan pendidikan proaktif dan pemecahan masalah sehingga dapat memecahkan masalah pencapaian tujuan di dalam pendidikan. Membicarakan terkait dengan sistem pendidikan bukan suatu hal yang remeh, sistem pendidikan adalah suatu sistem yang lengkap serta saling terkait. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebijakan pendidikan diperlukan bagi penyelenggara pendidikan untuk merencanakan strategi yang konsisten dengan sistem dalam pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau *library research* dengan pemakaian buku-buku serta literatur lainnya sebagai objek utama penelitian. Pengertian dari metode penelitian kualitatif ialah metode yang bersumber bersandarkan

filsafat positivisme yang dipakai buat meneliti suatu obyek tertentu.¹ Untuk data yang dipakai dalam penelitian ini yakni buku, artikel junal, skripsi dan thesis yang berkaitan dengan tema yang diangkat kemudian akan diolah dengan teknik analisis teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kebijakan Pendidikan

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan seringkali dikaitkan dengan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yang mana diharapkan dapat diterapkan di setiap sekolah yang ada. Makna dari kebijakan sendiri ditafsirkan sebagai politik, aturan, keputusan undang-undang, peraturan konvensi, kesepahaman serta rencana strategis lainnya. Dalam konteks yang lain kebijakan ini tak hanya mengatur system operasional secara internal melainkan juga mengatur mengenai perihal fungsi secara konseptual diantara sistem.²

Kemudian di lain sisi ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa kebijakan adalah perilaku sejumlah oknum (pemerintah) dalam sebuah bidang tertentu atau bahkan merupakan suatu deklarasi dengan dasar tertentu yang mengarahkan pada suatu program atau rencana tertentu.³ Namun dari semua pendapat yang ada kebijakan pendidikan dapat disimpulkan sebagai sebuah ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pihak tertentu seperti pemerintah, pakar ahli, dan beberapa oknum yang terlibat dalam pendidikan, kemudian ketetapan yang sudah disepakati dan dipertimbangkan oleh beberapa oknum tersebut selanjutnya menjadi program yang harapannya dapat diterapkan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan dibuat dengan menyesuaikan tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang tertera di Undang- Undang nomor 20 tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional.⁴ Tercapainya tujuan pendidikan nasional sangatlah berpengaruh bagi mutu pendidikan di Indonesia. Maka, dalam menetapkan suatu kebijakan pendidikan tidak dapat semata-mata langsung ditetapkan, akan tetapi perlunya memperhatikan akan dampak yang nantinya terjadi ketika kebijakan tersebut telah ditetapkan. Untuk itu, dalam menetapkan suatu kebijakan perlunya memperhatikan akan 5 komponen kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones supaya hasilnya dapat dirasakan oleh setiap kalangan.

¹ Yoyo Zakaria Ansori, Indra Adi Budiman, dan Dede Salim Nahdi, "Islam Dan Pendidikan Multikultural," *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 110–15, <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>.

² Farid Setiawan dkk., "Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 18, no. 1 (2021): 62–71, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>.

³ Mohammad Emnis Anwar, "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 03, no. Januari (2014): 483–96.

⁴ Fadiyah Elwijaya, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati, "Konsep dasar kebijakan pendidikan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.29210/3003817000>.

Adapun 5 Komponen Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Tujuan (*Goal*) merupakan sebuah hasil yang ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok dengan kurun waktu yang sudah disepakati. Tujuan merupakan langkah awal yang diambil sebelum merencanakan sebuah kebijakan. Tujuan kebijakan pendidikan yang telah disusun hendaknya bersifat rasional sehingga mudah dijangkau oleh berbagai kalangan.
2. Rencana (*Plans*) merupakan tahap lanjutan sesudah menemukan tujuan yang akan dicapai. Rencana merupakan sebuah gagasan atau rancangan untuk dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga proses manajemen dan kebijakan pendidikan lebih terarah dan jelas dalam pengimplementasiannya.
3. Program (*Programme*) merupakan proses atau sebuah kegiatan yang mana bentuk implementasi dari suatu yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Penerapan suatu program dalam kebijakan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan beberapa alternatif dalam pengambilan keputusan.
4. Keputusan (*Decision*) merupakan hasil yang disepakati dari program yang telah dibentuk sebelumnya. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pertimbangan akan hasil uji coba terhadap beberapa alternatif yang telah dibuat ketika berada di tahap program. Hasil dari keputusan kebijakan pendidikan hendaknya bersifat rasionalitas agar tidak ditentang oleh beberapa pihak.
5. Dampak (*Effects*) merupakan hal yang mungkin terjadi ketika kebijakan pendidikan tersebut diterapkan. Dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi setelah dilaksanakannya kebijakan maka dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang akan mendatang.⁵

B. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Karakteristik merupakan sebuah pernyataan yang dapat menonjolkan ciri khas dari suatu hal. Membicarakan suatu hal kebijakan ini bukan dianggap suatu hal yang remeh, namun hal ini harus benar-benar diperhatikan adanya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam mengesahkan suatu kebijakan ialah dengan memperhatikan hal kecil namun penting perannya seperti karakteristik kebijakan pendidikan. Hadirnya karakteristik sebagai sebuah acuan untuk membuat keputusan dalam penetapan kebijakan pendidikan. Karakteristik kebijakan pendidikan yang disebutkan meliputi 6 karakteristik diantaranya:

1. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan wajib mempunyai tujuan. Untuk memberikan kontribusi secara nyata bagi pendidikan, kebijakan tersebut harus mempunyai target yang jelas dan tepat sasaran.

⁵ Elwijaya, Mairina, dan Gistituati.

2. Memenuhi aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan wajib dilaksanakan dengan aman, dan kondisi harus diciptakan agar kebijakan pendidikan diakui secara hukum dan diterapkan secara lokal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan wajib disesuaikan dengan syarat konstitusional yang berlaku di daerah agar sah dan resmi berlaku di daerah. Oleh karena itu, kami dapat mengusulkan kebijakan pendidikan yang sah.

3. Memiliki konsep operasional

Tentu saja kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum perlunya memiliki nilai operasional agar dapat dilaksanakan, yang penting untuk memperjelas fungsi pendukung keputusan, serta kebijakan yang mau dicapai, ada juga pencapaian target pendidikan yang akan dicapai.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan wajib dikembangkan serta diberdayakan oleh para ahli di bidangnya agar tidak merugikan pendidikan serta lingkungan non pendidikan. Pengelola lembaga, pengelola pendidikan, serta politisi yang turut serta dalam pendidikan yakni komponen minimal dari kebijakan pendidikan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan pastinya tidak lepas atas realitas selanjutnya. Jika sudah baik perlu dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut, dan jika mengandung kesalahan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pedoman pembentukan karakter dapat dengan evaluasi yang sederhana serta efisien.

6. Memiliki sistematika

Tentu saja kebijakan pendidikan juga merupakan sistem, sehingga perlu mempunyai sistem yang jelas dalam segala aspek yang ingin diaturnya. Sistem tersebut juga harus sangat efektif, efisien dan berkelanjutan, sehingga kebijakan pendidikan tidak terstruktur secara pragmatis, diskriminatif serta rapuh karena sejumlah faktor yang hilang atau saling bertentangan. Hal tersebut perlu diperhatikan dengan seksama agar penerapannya tidak menimbulkan cacat hukum internal. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan secara eksternal ke dalam bidang kebijakan lainnya; politik politik; kebijakan moneter; bahkan di atas atau di bawah serta di bawah kebijakan pendidikan serta daya saing produk berbasis sumber daya di daerah.⁶

C. Tujuan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan erat hubungannya dengan tujuan pendidikan. Hadirnya tujuan pendidikan diharapkan dapat memberikan arah yang jelas untuk dapat menentukan sebuah kebijakan pendidikan. Tak hanya tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan pun mempunyai tujuan

⁶ Abdul Rozak, "Kebijakan Pendidikan di Indonesia" 3, no. 25 (2021): 197–208.

agar lebih terstruktur serta terarah dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya dengan adanya sebuah tujuan tentunya akan memberi arah dalam hidup, dengan menetapkan suatu tujuan maka bakal jelas pula target yang akan mau dicapai.

Terdapatnya arah tujuan memungkinkan pikiran kita untuk fokus ketimbang melepaskan energi buat menggapai sesuatu yang abstrak. Ini sama halnya dengan kebijakan pendidikan yang mana perlu adanya sebuah tujuan, berkenaan dengan hal tersebut maka dijelaskan bahwasanya tujuan kebijakan pendidikan meliputi beberapa hal diantaranya yakni:

1. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan masyarakat

Kebijakan yang berdasar pada tingkatan masyarakat sendiri, dapat kita telusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Kemudian sebuah pendidikan disini mampu mengubah suatu individu jadi lebih baik sebelum ia di bimbing. Selanjutnya dalam pendidikan sendiri dilatih pula nilai-nilai kebajikan kepada seseorang, maka dari hal tersebut nantinya individu-individu ini memahami mana yang dianggap itu baik dan juga mana yang dianggap itu buruk. Maka dari sini dapat dikatakan bahwasanya pendidikan ialah suatu langkah menyempurnakan harkat serta martabat manusia yang diusahakan secara kontinyu.

2. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan politisi

Dimana dalam sebuah tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan politisi ini dapat kita telusuri dari kontribusi pendidikan pada perkembangan politik dalam kedudukan sosial yang berbeda. Pendidikan disini menolong para peserta didik khususnya dalam membangun sikap serta ketrampilan kewarganegaraan yang positif guna membentuk warga negara yang benar serta bertanggung jawab. Orang yang terpelajar diharapkan lebih memahami wewenang serta peranannya agar nantinya pandangannya serta kepribadiannya demokratis. Disisi lain juga, orang yang terpelajar diharapkan juga mempunyai kesadaran serta tanggung jawab khususnya pada bangsa dan juga negara yang mana lebih baik daripada orang yang kurang terpelajar.

3. Tujuan kebijakan didasarkan pada tingkatan ekonomi

Bahwasanya tujuan kebijakan yang didasarkan pada tingkatan ekonomi ini bisa kita telusuri berdasarkan adanya sebuah pandangan berkaitan dengan esensial pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang mana bisa kita lihat alasannya seperti di bawah ini:

- a. Pendidikan merupakan suatu sarana untuk perkembangan ekonomi, pendidikan disini dapat menolong siswa dalam memperoleh ilmu serta ketrampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka terlihat bahwasanya semakin berpendidikannya seseorang, maka tingkatan penghasilan juga akan semakin baik, hal tersebut terjadi dikarenakan orang yang terpelajar jauh lebih produktif ketimbang orang yang kurang terpelajar.
- b. Investasi pendidikan disini tentunya akan memperoleh nilai balik yang lebih

bersanding investasi fisik dari bidang lain. Nilai balik pendidikan merupakan tolak ukur antara jumlah anggaran yang dipakai untuk membiayai pendidikan berdasarkan jumlah penghasilan yang hendak diterima nantinya selepas seseorang terjun di dunia kerja.⁷

D. Fungsi Kebijakan Pendidikan

Kaitannya dengan fungsi kebijakan pendidikan disini, Bahwasanya fungsi dari kebijakan pendidikan ini semata-mata dibuat guna menjadi sebuah pedoman di dalam melakukan suatu tindakan, mengelola kegiatan dalam pendidikan, organisasi ataupun sekolah dengan masyarakat serta pemerintah guna menggapai suatu target yang sudah ditentukan. Maka berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan disini merupakan garis umum di dalam melakukan tindakan terhadap pengambilan suatu keputusan pada semua tingkatan pendidikan ataupun organisasi.⁸

KESIMPULAN

Menetapkan suatu kebijakan pendidikan tidak dapat semata-mata langsung ditetapkan, akan tetapi perlunya memperhatikan akan dampak yang nantinya terjadi ketika kebijakan tersebut telah ditetapkan. menetapkan suatu kebijakan perlunya memperhatikan akan 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu *goals, plans, programme, decision, dan efect*. Tidak hanya komponen kebijakan namun 6 karakteristik kebijakan pendidikan juga memiliki peran.

Karakteristik tersebut adalah 1). Mempunyai tujuan pendidikan, 2). Memenuhi aspek legal-formal, 3) Mempunyai konsep operasional, 4). Dibentuk oleh yang berwenang, 5). Dapat dievaluasi serta 6) Memuat sistematika. Hadirnya komponen dan karakteristik kebijakan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan kebijakan pendidikan yang hubungannya sangat erat dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan yang tertera di dalam UU mengenai sistem pendidikan nasional. Maka, pentingnya memahami konsep akan kebijakan pendidikan sebagai dasar utama sebelum memperdalam serta menyikapi mengenai kebijakan yang sudah dan akan ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rozak. "Kebijakan Pendidikan di Indonesia" 3, no. 25 (2021): 197–208.

⁷ Kasmeni, Risma, dan Irmawati, "Analisis peran manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi," *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).

⁸ Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," *E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id*, 2019, 107–17.

Anisa Nuraida Rahmah, Aulia Farkhan, Umar Alwatasi, Farid Setiawan : Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Ansori, Yoyo Zakaria, Indra Adi Budiman, dan Dede Salim Nahdi. "Islam Dan Pendidikan Multikultural." *Jurnal Cakrawala Pendas* 5, no. 2 (2019): 110–15. <https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370>.

Anwar, Mohammad Emnis. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 03, no. Januari (2014): 483–96.

Elwijaya, Fadiyah, Vivi Mairina, dan Nurhizrah Gistituati. "Konsep dasar kebijakan pendidikan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 67. <https://doi.org/10.29210/3003817000>.

Kasmeni, Risma, dan Irmawati. "Analisis peran manajemen kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi." *Jurnal Mappesona* 3, no. 3 (2020).

Setiawan, Farid, Wildan Taufiq, Ayu Puji Lestari, Risma Ardianti Restianty, dan Lailli Irna Sari. "Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 18, no. 1 (2021): 62–71. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.263>.

Tawa, Angelika Bule. "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar." *E-Journal.Stp-Ipi.Ac.Id*, 2019, 107–17.